

BAB 4

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Prinsip *Minsheng* adalah persoalan utama penghidupan. Prinsip *Minsheng* tidak berlandaskan pada materialisme historis Marx melainkan pada interpretasi sosial terhadap sejarah dari Maurice William. Inti dari pandangan William adalah nafkah penghidupan adalah kekuatan pusat dari perkembangan sosial. Oleh karena itu, metode pemerataan pendapatan merupakan hal yang ditekankan Prinsip *Minsheng*. Pemerataan pendapatan masyarakat menjadi sasaran utama *Minsheng*. Lebih khusus, Sun Yat-sen menyarankan dua cara dalam upaya mencapai pemerataan pendapatan masyarakat yaitu pemerataan hak kepemilikan tanah dan pengaturan modal.

Secara umum, Prinsip *Minsheng* adalah prinsip yang menangani masalah ekonomi masyarakat yang meliputi masalah individu dan komunitas masyarakat nasional juga. Sementara, sosialisme hanya meliputi masalah ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sosialisme menjadi bagian Prinsip *Minsheng*.

Hal-hal pokok pada Prinsip *Minsheng* adalah Pendirian Sun terhadap interpretasi sejarah, pajak atas tanah, kerja sama antar kelas masyarakat dan peran negara pada kehidupan ekonomi masyarakat. Pajak atas tanah merupakan program dalam reformasi tanah yang menanggulangi masalah ketidakadilan pada hak kepemilikan tanah. Selain itu, kerja sama antar anggota masyarakat menjadi upaya menciptakan keharmonisan bersama. Unsur politis yang juga penting adalah peran negara. Pada Prinsip *Minsheng*, negara harus melindungi produk dalam negeri melalui kebijakan tarif, membangun industri kebutuhan pokok untuk mengganti produk kebutuhan yang diimpor dari negara lain, menegakkan hukum perlindungan terhadap hak-hak petani, buruh dan kaum tidak mampu lainnya dan juga sebagai menetapkan perundang-undangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Hal berikutnya yang dapat disimpulkan adalah Prinsip *Minsheng* memiliki beberapa tujuan yaitu untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, keharmonisan dan kekuasaan negara. Keadilan yang ingin dicapai Prinsip *Minsheng* yaitu keadilan pada masyarakat dalam negeri serta keadilan pada lingkungan Internasional.

Selain untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat Cina, Prinsip *Minsheng* juga dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat terwujud dengan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Setelah kebutuhan pokok terpenuhi, bersamaan dengan itu, Prinsip *Minsheng* juga mengatur berbagai kebutuhan pendukung lainnya sehingga kesejahteraan dapat tercapai sepenuhnya.

Di samping itu, Prinsip *Minsheng* juga bertujuan menciptakan keharmonisan. Prinsip *Minsheng* menyarankan agar semua lapisan masyarakat saling bekerja sama demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selama ini, hal yang menyebabkan konflik muncul di masyarakat karena tiap-tiap orang berjuang mempertahankan eksistensinya melalui pencarian nafkah. Melalui Prinsip *Minsheng* semua orang diharapkan bekerja sama dan sadar akan kepentingan umum yang harus didahulukan. Jika kerja sama dapat terwujud antar kelompok masyarakat maka keharmonisan dapat tercapai. Lebih spesifik, Sun menginginkan suatu dunia baru yang semua orang saling bekerja sama sehingga terwujud apa yang disebut dengan Harmoni Agung.

Tujuan terakhir namun sangat penting dalam Prinsip *Minsheng* adalah kekuasaan negara. Prinsip *Minsheng* mengatur bagaimana negara harus berperan sebagai pemegang otoritas dan pelindung masyarakat, penggerak dan pengelola industri negara dan pewujud kesejahteraan masyarakat.

Sejak 1905, Prinsip *Minsheng* telah menjadi ideologi. Pada teorinya, Guomintang berusaha untuk mengimplementasikan Prinsip Sun namun tidak berjalan. Hal tersebut dikarenakan saat itu kondisi politik Cina tidak stabil. Sementara itu, implementasi Prinsip *Minsheng* Sun Yat-sen di Taiwan lebih merupakan retorika politik Guomintang. Meskipun demikian, Guomintang mencoba merealisasikan sebagian prinsip *Minsheng*. Hal pertama yang dilakukan Guomintang adalah reformasi tanah. Pada tahun 1926 Guomintang mulai mewujudkan reformasi tanah di Cina daratan. Tuan tanah diharuskan untuk mengurangi sewa 25 persen, yang berarti sebagian besar sewa tidak akan lebih dari 37,5 persen dari total panen pertanian tiap tahun. Pada tahun 1930, hal tersebut ditetapkan sebagai sewa maksimum. Namun, karena perang saudara, hal tersebut tidak dapat diimplementasikan. Tahun 1949, di Taiwan, Guomintang melaksanakan

reformasi tanah yang belum berhasil dilakukan di Cina daratan. Karena pengurangan sewa, harga tanah menurun. Pada tahun 1952 tanah yang disewakan seharga hanya sepertiga harganya. Oleh karena itu, tuan tanah harus menjual dengan murah kepada penyewa. Program ini telah meningkatkan sejumlah petani penyewa menjadi pemilik pertanian kecil dan pada tahun 1988 hanya enam persen keluarga petani yang bekerja di lahan orang lain.

Hal lain yang dapat disimpulkan bahwa *Minsheng* tidak hanya sebagai prinsip ekonomi tetapi merupakan sistem ekonomi politik. *Minsheng* meliputi berbagai mekanisme dan institusi dalam membuat dan menerapkan peraturan mengenai produksi, pendapatan dan konsumsi. Prinsip *Minsheng* menjadi suatu sistem ekonomi politik yang cakupannya luas. Prinsip tersebut mencakup peran pemerintah yang dominan dalam perekonomian, aktif menangani redistribusi pendapatan, mengintervensi serta mengatur mekanisme pasar secara langsung, mengintervensi proses produksi, distribusi, juga turut aktif mengupayakan pembentukan kelompok konsumen, namun hak milik pribadi dan inisiatif individu diakui.

Dalam Prinsip *Minsheng*, organisasi pembuat keputusan berada di tangan pemerintah (sentralisasi). Pemerintah pusat membuat berbagai kebijakan ekonomi yang harus dilaksanakan di seluruh daerah di Cina. Penyediaan informasi dan koordinasi dilaksanakan tetap melalui perencanaan pemerintah. Hak kepemilikan dalam *Minsheng* merupakan hak kepemilikan kooperatif yang mengakui hak kepemilikan pribadi dan juga berkontribusi bagi kepemilikan umum. Sistem insentif yang ada dalam *Minsheng* dapat meliputi insentif moral dan materiil.

Berbicara mengenai insentif moral, Sun menekankannya pada pentingnya kesadaran untuk saling berbagi dan menghindari konflik karena kepentingan ekonomi. Sementara itu, insentif materiil juga ditumbuhkan saat membahas hubungan kapitalis dan buruh. Kapitalis memberikan insentif materiil kepada kaum buruh berupa gaji yang lebih tinggi, tempat kerja yang layak, serta berbagai jaminan bagi buruh yang akan menyebabkan buruh semakin rajin bekerja sehingga menghasilkan produksi yang lebih banyak bagi kapitalis.